



# PRIORITAS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN

# 2022

**MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS INDUSTRI,  
PERTANIAN DAN PARIWISATA DENGANTATA KELOLA  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**

**BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU  
DALAM FORUM PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

*Pekanbaru, 23 FEBRUARI 2021*



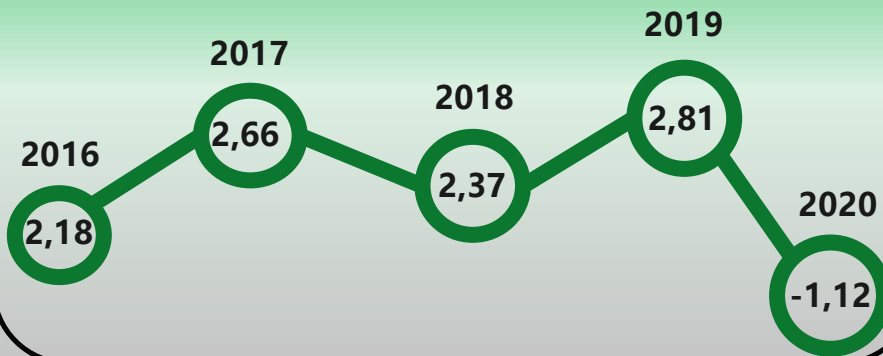


# GAMBARAN UMUM EKONOMI MAKRO

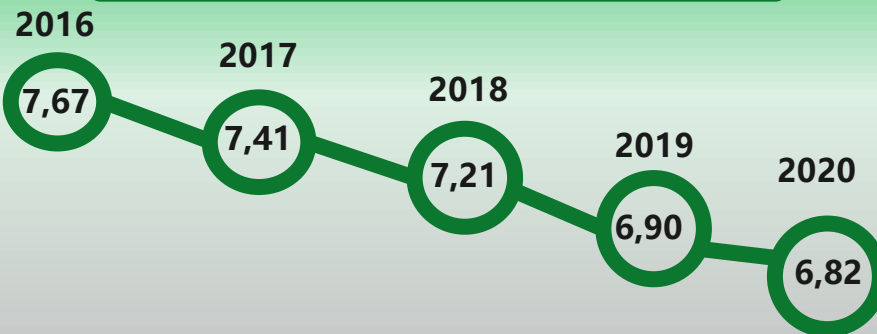


# CAPAIAN EKONOMI MAKRO PROVINSI RIAU

## PERTUMBUHAN EKONOMI (%)



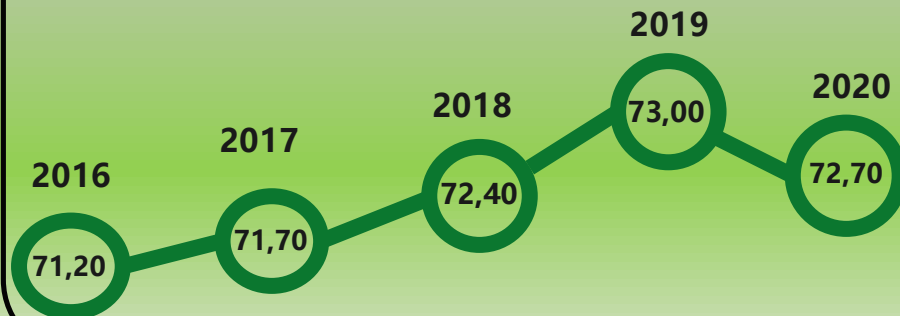
## TINGKAT KEMISKINAN (%)



## TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

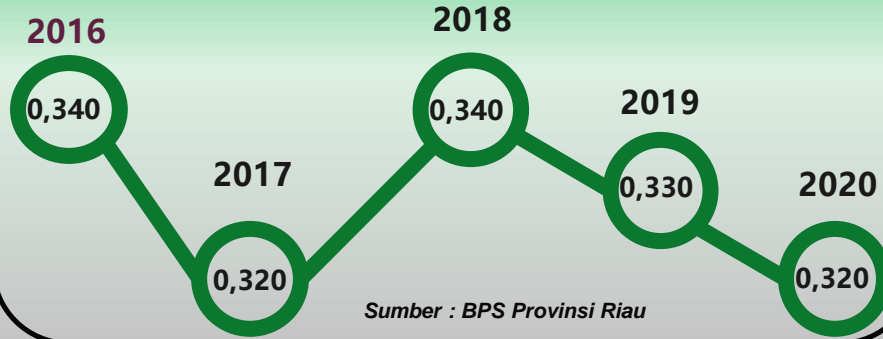


## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (poin)

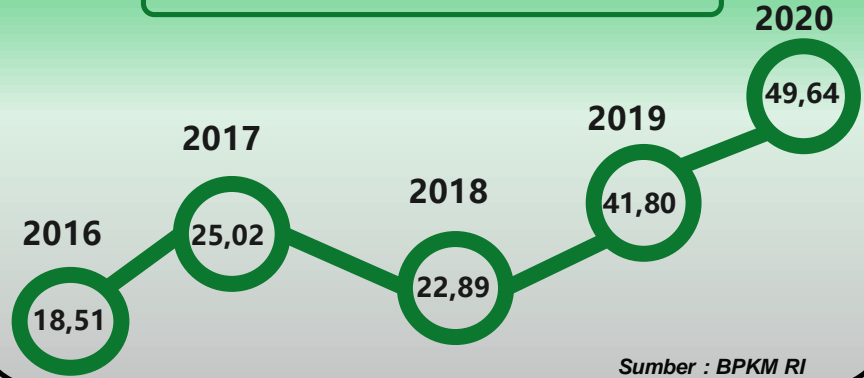


# CAPAIAN EKONOMI MAKRO PROVINSI RIAU

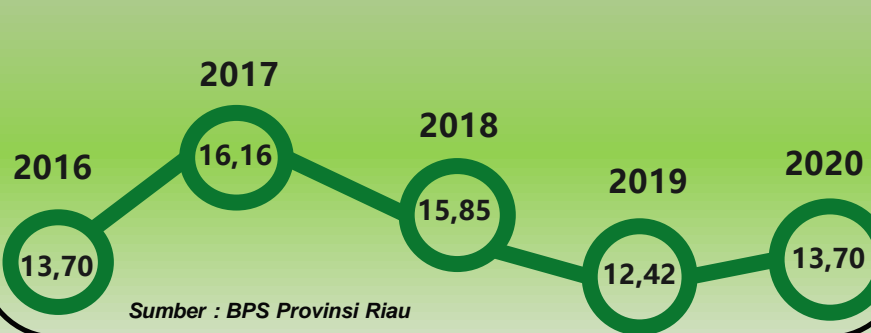
## GINI RATIO (poin)



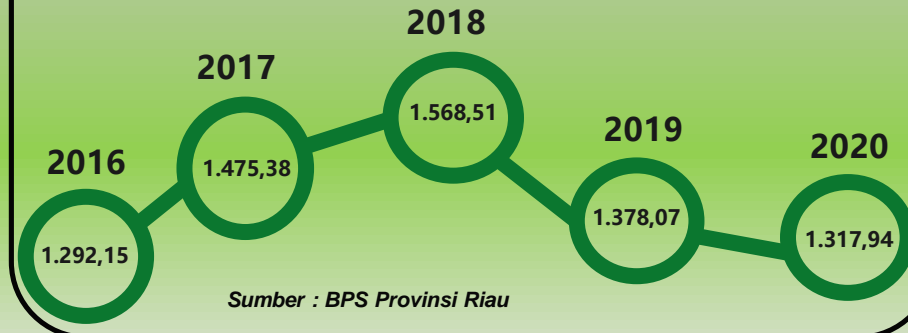
## REALISASI INVESTASI (triliun)



## EKSPOR (miliar USD)



## IMPOR (juta USD)





# TEMA RKPD PROVINSI RIAU TAHUN 2022



# TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

## TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Desember



### Persiapan

- Pembentukan Tim Penyusun RKPD & Orientasi tentang RKPD
- Pengumpulan Data dan Informasi
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD



### Forum Perangkat Daerah

Pembahasan Rancangan Renja-PD

Januari s.d. Februari Minggu I



### Penyusunan Ranwal

Pengolahan data & Informasi, perumusan permasalahan pemb. Daerah, Perumusan sasaran & prioritas daerah



### Pelaksanaan Musrenbang

- Penyiapan data dan kegiatan
- Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- Perumusan Hasil Musrenbang RKPD



### Forum Konsultasi Publik

- Penyelarasan Renc Prog Prioritas beserta pagu indikatif S.E. KDH tentang Penyusunan Rancangan RKPD



### Perumusan Rankir

- Evaluasi Musrenbang RKP dan RKPD Prov.
- Sinkronisasi Musrenbang RKPD Kab./Kota
- Penyelarasan Penyajian

Februari Minggu II s.d. Maret Minggu IV



### Penyusunan Rancangan

- Evaluasi Rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi
- **Verifikasi dan Integrasi** Rancangan Renja-PD
- Penyelarasan Penyajian



### Penetapan

- Evaluasi APBD oleh Gubernur
- Penetapan RKPD

Maret Minggu IV - April Minggu I

April Minggu I s.d. Mei Minggu II

Juni

# VISI PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari

Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan



Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

# MISI PROVINSI RIAU 2019-2024



Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya



Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan



Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing



Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing



Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima Berbasis Teknologi Informasi



# TEMA DAN PRIORITAS PROVINSI RIAU 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN PROVINSI RIAU 2019-2024



# RUMUSAN PERMASALAHAN / ISU STRATEGIS

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

PARIWISATA

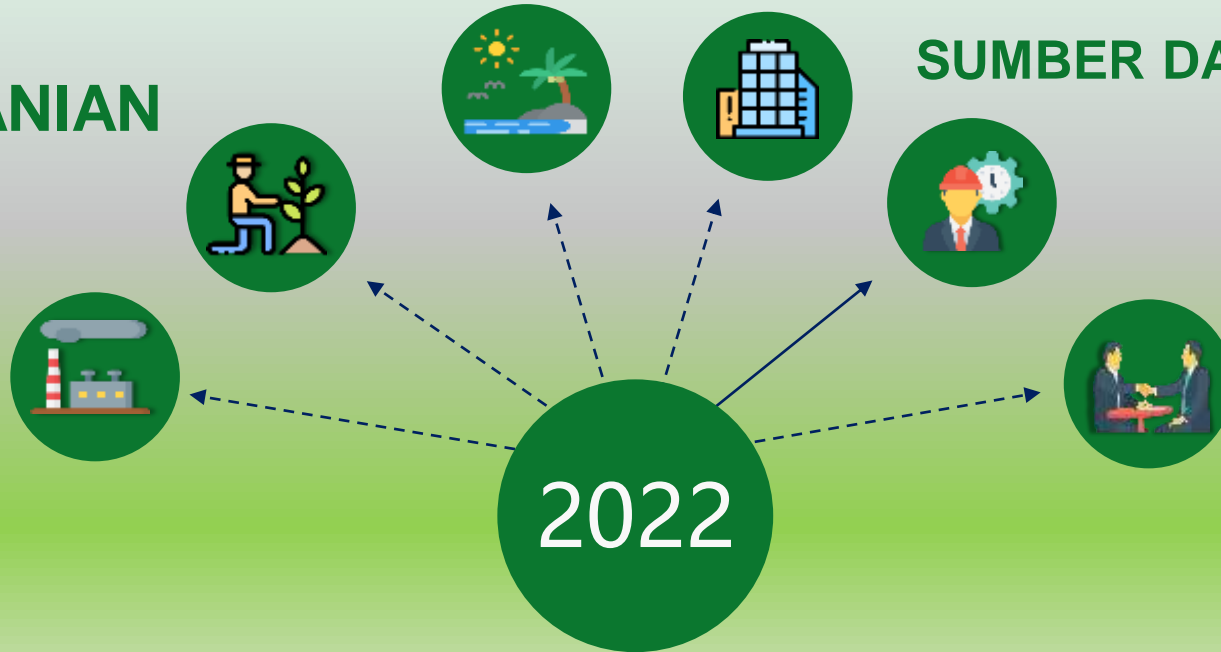
INFRASTRUKTUR

PERTANIAN

SUMBER DAYA MANUSIA

TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN  
DAN PELAYANAN  
PUBLIK YANG  
PRIMA

INDUSTRI



# RUMUSAN PERMASALAHAN / ISU STRATEGIS

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

## INDUSTRI

1. Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasana pendukung
2. Produksi produk IKM yang belum memenuhi kebutuhan pasar.
3. Perizinan dan sertifikasi produk IKM serta HAKKI
4. Strategi pemasaran produk IKM melalui pasar tradisional, pasar modern dan pasar online).

## PERTANIAN

1. Luas Tanam dan Luas Panen semakin menurun
2. Sarana dan Prasarana belum merata sesuai kebutuhan usaha tani
3. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura masih Rendah
4. Penerapan teknologi pertanian belum optimal

## PARIWISATA

1. Masih terdapatnya destinasi wisata di Provinsi Riau yang belum memenuhi standar pariwisata berkelanjutan
2. Promosi pariwisata yang belum optimal dan Atraksi wisata belum beragam
3. Masih SDM pariwisata yang belum seluruhnya tersertifikasi
4. Pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

## INFRASTRUKTUR

1. Kondisi jalan Provinsi Riau dalam kondisi mantap masih rendah
2. Meningkatkan angkutan orang dan barang melalui terminal/pelabuhan/bandara;
3. Peningkatan layanan air minum curah lintas kab/kota dan layanan sanitasi;
4. Belum tersedianya layanan penanganan sampah lintas kab/kota
5. Luasnya penanganan kawasan kumuh permukiman
6. Peningkatan sistem irigasi di 8 DI dan 34 DIR
7. Panjangnya abrasi pantai yang belum tertangani

## SUMBER DAYA MANUSIA

1. Peningkatan Aksesibilitas terhadap Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Peningkatan mutu dan Relevansi Pendidikan bagi peserta didik;
4. Penurunan kejadian mortalitas dan morbiditas;
5. Peningkatan pengembangan layanan menuju rumah sakit umum dan khusus;
6. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
7. Peningkatan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan panti;
8. Pemberdayaan melalui peningkatan peran dan fungsi serta pembinaan terhadap PSKS;
9. Integrasi pelayanan sosial melalui pembentukan layanan sosial terpadu satu pintu (SLRT) serta pembinaan unsur sosial pemberi layanan;
10. Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Budaya Melayu;

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG

1. Peningkatan implementasi nilai Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Budaya Kerja;
3. Peningkatan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik ;
4. Peningkatan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau;
5. Peningkatan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
6. Peningkatan implementasi Pemantauan dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas risiko perangkat daerah;
7. Peningkatan penanganan gratifikasi.
8. Peningkatan implementasi SPBE;
9. Integrasi penyusunan kebijakan tata kelola pemerintah.

# DESKRIPSI PRIORITAS DAERAH TAHUN 2022

## INDUSTRI

Pengembangan Industri, pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan dan peningkatan investasi, serta peningkatan infrastruktur menuju kawasan industri.

## PERTANIAN

Peningkatan produksi, produktivitas, mutu, sarana dan prasarana pertanian, konservasi tanah dan air.

## PARIWISATA

Peningkatan sarana prasarana, pengembangan event, destinasi wisata dan kebudayaan serta pembinaan ekonomi kreatif.

## INFRASTRUKTUR

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi, permukiman, kelistrikan dan air minum.

## SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan dan Peningkatan kualitas Pendidikan, Pelayanan dan Sarana Prasarana kesehatan, Bantuan Sosial, Program sembako dan PKH, pengembangan kepemudaan olahraga, ketenagakerjaan, kebudayaan, Rehabilitasi Sosial, penanganan Fakir Miskin, serta kebijakan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial.

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, kompetensi sarana prasarana aparatur dan pembinaan ASN dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## PENDUKUNG PRIORITAS

Merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan yang mendukung/menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

## INDUSTRI

**14 Program**

**27 Kegiatan**

**Rp. 203,98 Miliar**

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

## PERTANIAN

**13 Program**

**77 Kegiatan**

**Rp. 363,92 Miliar**

1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
2. Dinas Perkebunan
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM

## PARIWISATA

**9 Program**

**37 Kegiatan**

**Rp. 20,33 Miliar**

1. Dinas Kebudayaan
2. Dinas Pariwisata
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

## INFRASTRUKTUR

**16 Program**

**83 Kegiatan**

**Rp. 962,26 Miliar**

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3. Dinas Perhubungan
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## SUMBER DAYA MANUSIA

**48 Program**

**356 Kegiatan**

**Rp. 1,94 Triliun**

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan, RS Petala Bumi
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
6. Dinas Sosial
7. Sekretariat Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

**8 Program**

**31 Kegiatan**

**Rp. 28,56 Miliar**

1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4. Sekretariat Daerah



# PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2022

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET PROVINSI RIAU



# HASIL EVALUASI CAPAIAN PROGRAM

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020

No	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN	CAPAIAN	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1 Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	100 Persen	54,30 persen	54.30%	Tidak Tercapai
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	1 Persentase Pengelolaan Aset Daerah Yang Berkualitas	100 Persen	91,29 persen	91.29%	Tercapai

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019

No	IKU	Capaian (%)	Program	Tahun 2019			Catatan Analisis/
			Kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	Keterangan
1	Persentase APBD/APBD-P Provinsi Riau sesuai ketentuan	100	<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	20 Perda dan Pergub			
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Perda dan Pergub	52.76%	49.56%	
2	Persentase Penatausahaan Keuangan Provinsi Riau Sesuai ketentuan	100	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
			Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Aktual	100 orang	63.66%	50.12%	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	10 laporan	-	0	
3	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau Sesuai Ketentuan	100	<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
			Revaluasi/ Appraisal Aset/Barang Daerah	48 BMD	95.51	94.58	
			Pembuatan Alas Hak dan Sertifikat Tanah Milik Pemrov Riau	10 sertifikat	0	0	
			Pengamanan Aset Milik Daerah	165 aset	57.56%	54.84%	Kegiatan prioritas dalam penataan aset pemerintah daerah, namun tidak terlaksana secara optimal.
			Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau	30 BMD	69.52%	46.60%	Kegiatan prioritas dalam penataan aset pemerintah daerah, namun tidak terlaksana secara optimal.
			Pemeliharaan Aset Provinsi Riau	22 BMD	73.84%	75.24%	Realisasi fisik lebih besar dari realisasi keuangan.
			Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Riau	24 dokumen	94.12%	73.84%	
			Rekonsiliasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 laporan	52.28	34.12%	
			<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>				
			Pelaksanaan Operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau	60 kali	84.96%	82.61%	

Catatan : ada perbedaan nama program pada tahun 2020 dengan tahun 2019

# PEMETAAN PERMASALAHAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Permasalahan	Akar Masalah
1	Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;	Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal
2	Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
3	Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;	Keterbasatan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
4	Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;	Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
5	Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;	Adanya perbedaan format-format laporan dan kode rekening Belanja atau barang milik daerah pada modul-modul Sistem Informasi Keuangan Daerah
6	Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;	Adanya beberapa rekening belanja yang belum bisa untuk menggunakan pola transaksi non-tunai
7	Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia	Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana



# PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

PROGRAM PRIORITAS (RPJMD 2019-2024)			KEGIATAN PRIORITAS (RENSTRA PD 2019-2024)
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEGIATAN
<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	100	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
			Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan
			Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah</b>	Persentase pengelolaan aset daerah yang berkualitas	100	Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
			Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
			Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau

# CROSS CUTTING PROGRAM

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

1. Evaluasi pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk perbaikan pola/system/mechanisme BKK yang lebih baik (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau)
2. Intervensi program diluar kewenangan yang mendukung pencapaian kinerja program prioritas daerah dibidang kepariwisataan (Dinas Pariwisata-Program Pengembangan Destinasi pariwisata dengan indicator program Jumlah Destinasi dan KSPP yang ditingkatkan daya tariknya);

Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah

1. Legalitas Aset di masing-masing OPD/UPT;
2. Optimalisasi Penerimaan daerah dari asset-asset produktif (seluruh OPD, UPT Potensial di lingkungan Perangkat Daerah);
3. Redistribusi/pengalihan asset untuk mendukung program OPD terkait (Dinas Pendidikan-SMK);
4. Tindaklanjuti hasil inventarisasi asset (kendaraan pemerintah) untuk mendorong penerimaan daerah dari sektor PKB (Dipenda Riau).



# BARANG MILIK DAERAH PROVINSI RIAU

## TANAH

**DATA AUDITED 2018**

Jumlah = 960 persil

Nilai = Rp. 13,63 Triliun

baru 53,14% yang  
terinventarisasi



**TELAH DIINVENTARISASI**

Jumlah = 289 persil

Nilai = Rp. 7,24 Triliun

## KENDARAAN

**DATA AUDITED 2018**

Jumlah = 2.801 Unit

Nilai = Rp. 448 Miliar

baru 81,37% yang  
terinventarisasi



**TELAH DIINVENTARISASI**

Jumlah = 1.386 Unit

Nilai = Rp. 365 Miliar

## GEDUNG DAN BANGUNAN

**DATA AUDITED 2018**

Jumlah = 7.368 Unit

Nilai = Rp. 6,73 Triliun

baru 6,45% yang  
terinventarisasi



**TELAH DIINVENTARISASI**

Jumlah = 670 Unit

Nilai = Rp. 434 Miliar

# PAGU INDIKATIF PROGRAM BPKAD PADA RPJMD

## Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

8.032,83 M

Tahun  
2024

6.192,95 M

Tahun  
2020

6.535,42 M

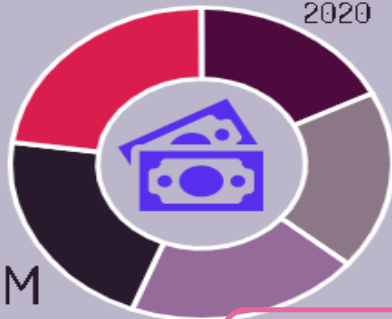
Tahun  
2021

7.501,06 M

Tahun  
2023

6.984,87 M

Tahun  
2022



## Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah

2.974,85 M

Tahun  
2024

2.293,48 M

Tahun  
2020

2.420,31 M

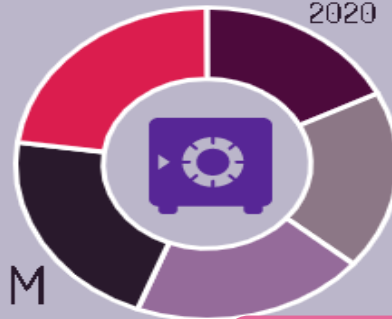
Tahun  
2021

2.777,92 M

Tahun  
2023

2.586,76 M

Tahun  
2022





**TERIMAKASIH**

**BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

Copyright 2021

